ABSTRAK

Keberadaan Instruksi wakil kepala daerah DIY PA.VIII/No.K.898/I/A 1975 sangat bertentangan dengan semangat yang terkandung didalam UUPA, akan tetapi hingga saat ini Instruksi wakil kepala daerah tersebut masih tetap eksis dilaksanakan terbukti dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui konsistensi penerapan UUPA setelah diterbitkannya Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY PA.VIII/No.K.898/I/A 1975 terkait dengan hak milik atas tanah bagi WNI non pribumi di Yogyakarta, Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 132/PDT/G/2017/PN YYK, Untuk mengetahui putusan yang adil terhadap hak atas tanah bagi WNI non pribumi di DIY.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah 1) Terjadinya inkonsistensi serta ketidak sinkronan pengaturan dan penerapan hukum secara vertikal antara UUPA dengan Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY PA.VIII/No.K.898/I/A 1975 terkait dengan hak milik atas tanah bagi WNI non pribumi di Yogyakarta terbukti dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk.
2) Pertimbangan hakim dalam memberikan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 132/PDT/G/2017/PN YYK bertentangan dengan semangat yang ada di peraturan dasar pokok-pokok agraria dan ground norm kita yakni pancasila serta peraturan perundang-undangan lainnya. 3) Bahwa fungsi pengadilan adalah untuk mencari keadilan, secara intelektual, maka putusan yang adil dalam perkara ini bukan niet ontvanklijke verklaard (NO) akan tetapi seharusnya dikabulkan seluruhnya oleh majelis hakim dengan kajian berdasarkan landasan folosofis, teoritis, dan juga yuridis.

Kata Kunci : *INSTRUKSI PA.VIII/NO.K.898/I/A/1975; HAT; WNI NON PRIBUMI*

ABSTRACT

The existence of instruction vice the head of the region yogyakarta PA.VIII/ No.K.898/I/A 1975 very as opposed to the spirit contained in UUPA , but until now instruction deputy head of the area still exist carried out proved by the establishment of district court decision yogyakarta No. 132/PDT.G/2017/PN YYK.

This research aims to reveal the consistency of the application of UUPA after the deputy head of the instructions you PA.VIII/ No.K.898/I/A 1975related to the rights of belonging to the ground for non indigenous citizens in yogyakarta , to know the district court ruling the judge in yogyakarta No. 132/PDT.G/2017/PN YYK district , to know decisions which are fair to land rights for citizens non indigenous in you.

The research received sinkronan 1) the inconsistency and the setting up and application of the law vertically between uupa by instruction deputy regional head of yogyakarta PA.VIII/ No.K.898/I/A 1975related to the rights of belonging to the ground for non indigenous citizens in yogyakarta proved by the establishment of first instance decisions yogyakarta PA.VIII/ No.K.898/I/A 1975 district. 2) consideration a judge in district court ruling yogyakarta PA.VIII/ No.K.898/I/A 1975 district opposed to the spirit that is basic instructions pokok-pokok our agrarian and ground norm and by other rule .3) court that function is to seek justice, in an intellectual manner, so decisions which are fair in this matter is not niet ontvanklijke verklaard (NO) but should be granted entirely by the judge in with studies based on the folosofis, theoretical, and juridical.

Key Word : *Instruction vice the head of the region yogyakarta PA.VIII/ No.K.898/I/A 1975; HAT; non indigenous citizens*